

Paradoks Pilihan Kebijakan Upah Minimum dalam Konteks Politik Pembangunan Berbasis Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi

Muhammad Rusdi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Hasanuddin

Abstract: Problems related to the process of minimum wage policy change in South Sulawesi always peep out debate and conflict which sometimes do not express what the desire of coalition advocacy, especially between trade union and Apindo. The purpose of this article is to describe, analyze and interpret some factors applied by policy subsystem both as resources and constraints in the choice process of nominal UMP 2006, advocacy coalitions' policy resources to push the UMP policy change and the policy broker's strategy to mediate the conflict in the policy subsystem. The context of minimum wage policy subsystem, which consist of the Trade Union (SB), Association of Entrepreneur (Apindo), the government and the team of experts. Apindo's belief system is how to increase the production, labor's productivity and efficiency, while SB is important component in the production process. The other aspects showed that internal and external factors of the minimum wage policy in South Sulawesi including institutional aspects, existences and amounts of the coalition's members, and also their solidarity. Meanwhile, the external factors including the implementation of decentralization, mass media roles as well as the fluctuation of the economic condition, like inflation rate. In the context of UMP policy, SB and Apindo as coalition advocacy have policy resources to influence the UMP policy makers. Its involve ability of the policy subsystem, lobby mechanism, and also authority which they have.

Keywords: minimum wage, efficiency

Gerakan perburuhan telah menjadi indikator penting dalam konteks pilihan kebijakan perburuhan dan telah menjadi pusat perhatian para pakar kebijakan publik pada penghujung abad 20. Namun demikian, kesimpulan Stiglitz (2002); Jackson and Baldwin (2005) menggambarkan bahwa kebanyakan analisis tersebut belum memberikan gambaran tuntas terkait dengan makna keterlibatan kelompok buruh dan hubungannya dengan derajat perubahan kebijakan yang diinginkan mereka. Demikian pula, kesimpulan Johnson (2002) mendukung pernyataan tersebut yang disebabkan oleh konteks politik kebijakan pengupahan yang lebih memperhatikan kriteria efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Alamat Korespondensi:

Muhammad Rusdi, Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan

Disadari bahwa dalam pandangan sejarah, kehidupan kaum buruh yang semakin baik di negara-negara industri maju bukan berubah dengan sendirinya, akan tetapi melalui proses perjuangan kelas pekerja (*working class struggle*). Perjuangan tersebut berdasarkan paham Marx terjadi dalam proses perjalanan sejarah yang amat panjang. Meskipun negara-negara Eropa telah mengalami perubahan politik ke arah sistem politik demokrasi setelah revolusi Industri, namun praktis kehidupan buruh tidak secara otomatis menjadi lebih baik. Bahkan pada awal industrialisasi nasib mereka jauh lebih buruk dibandingkan dengan keadaannya di Indonesia saat ini. (Kusumo, 1998). Secara praktis telah menjadi sejarah moda produksi kapitalis (*capitalist mode of productions*) mana buruh ditekan untuk kepentingan akumulasi kapital dalam proses produksi.

Implikasinya dapat dilihat pada upaya Negara untuk menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke Indonesia dalam proses akselerasi

pembangunan. Hal ini terjadi sejak awal tahun 1980-an hingga penghujung tahun 2000-an, dengan mengandalkan investasi asing maupun domestik tak dapat dielakkan untuk menopang mekanisme pertumbuhan ekonomi (MacIntyre, 1997).

Kondisi tersebut secara langsung menyebabkan terjadinya gerakan buruh berupa tuntutan dinaikannya upah minimum dan juga perlakuan adil perusahaan. Hal ini kemudian menjadi strategi yang dipersepsikan oleh kelompok buruh sebagai jalan alternatif untuk meredam gejala ketidakadilan dalam konteks hubungan industrial yang ada. Hal ini telah menjadi fenomena tiap tahun dan bahkan sepanjang hubungan industrial belum terbangun secara lebih demokratis, seperti terjadi di Negara Eropa dan Australia. Fenomena tersebut bagi Negara berkembang, seperti Indonesia menarik dianalisis berkaitan dengan seberapa besar pengaruh kekuatan kelompok buruh dalam turut menentukan kebijakan upah minimum yang berimplikasi pada perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka.

AKAR PERMASALAHAN UPAH MINIMUM

Bila dilihat dari akar permasalahan, maka persoalan tersebut lebih disebabkan oleh beberapa faktor penting. *Pertama*, didasarkan pada asumsi bahwa di pasar tenaga kerja terjadi penawaran tenaga kerja (*supply*) melebihi permintaan (*demand*). Sehingga pengusaha mempunyai kekuatan untuk menekan upah. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan tawar menawar (*bargaining-power*) SB praktis tidak efektif untuk mendukung proses perubahan kebijakan yang diinginkan.

Namun, seiring dengan perkembangan demokratisasi saat ini secara perlahan telah menimbulkan kesadaran pekerja akan hak-haknya, sehingga timbul dorongan unjuk rasa sebagai pengungkapan kekuatan keberadaannya. Ditambah dengan pengetahuan mereka akan apa yang disebut dengan Upah Minimum Provinsi, selanjutnya disingkat UMP, buruh kemudian semakin sadar dan beranggapan bahwa UMP yang mereka terima belum memenuhi standar kehidupannya sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Secara kumulatif proses ini memberi implikasi langsung terhadap terjadinya proses pembelajaran bagi para aktor dalam skenario kebijakan UMP.

Sementara itu, para pengusaha memandang bahwa UMP yang belum memenuhi standar tersebut lebih disebabkan oleh terjadinya efek biaya tinggi yang terjadi dalam proses produksi, seperti semakin meningkatnya berbagai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat tertentu. Di samping itu, alasan ekonomis dari sisi meningkatnya biaya produksi sebagai efek samping dari kenaikan BBM pada tahun 2005. (Sosialisasi UMP Sulawesi Selatan, 2006).

Di satu sisi logika ini tampaknya rasional, sehingga mau tidak mau biaya tersebut dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi (*cost of production*). Naiknya biaya produksi menyebabkan naiknya harga jual, sehingga keuntungan margin (*margin profit*) cenderung relatif kecil. Secara makro hal ini memperlihatkan bahwa kinerja makro ekonomi akan mengalami distorsi yang ekksesnya akan menimbulkan inefisiensi dalam produksi secara agregat sebagai dampak dari naiknya biaya produksi yang tentu saja diikuti dengan meningkatnya harga satuan *output* (Djojohadikusumo, 1994).

Kedua, belum terciptanya hubungan industrial yang lebih baik yang seharusnya dibangun melalui sistem dan mekanisme komunikasi dua arah (*bipartite*) antara pengusaha dengan pekerja.

Proposisi yang mengungkap bahwa kenaikan upah secara makro menyebabkan naiknya daya beli masyarakat masih dapat diperdebatkan oleh karena disinyalir oleh para pakar bahwa kenaikan upah selalu diikuti oleh kenaikan inflasi (*demand side*), misalnya Coutts (2004) menjelaskan bahwa kondisi ini tidaklah dapat memberikan efek meningkatnya daya beli riil kelompok buruh.

Secara regional konflik yang seringkali terjadi adalah yang langsung berkaitan dengan masalah kesejahteraan dan ketenangan kerja para buruh di dalam perusahaan. Sebagai contoh kasus UMP yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2005 sebesar Rp510.000 perbulan yang selalu dipersepsikan oleh kelompok buruh sebagai upah yang tidak riil (Orasi Ketua FNPBI, 20-09-2005). (Bandingkan data upah minimum di sejumlah negara ASEAN seperti Jakarta dengan US 63, Bangkok US 94, Manila US 149 dan Hanoi US 58). (World Bank, 2003).

Meskipun demonstrasi buruh sedemikian kuat dan represif, namun dalam berbagai bentuknya

perubahan kebijakan UMP yang sesuai dengan tuntutan kelompok buruh belum tercapai dengan memadai. Hal ini disebabkan oleh relatif masih kuatnya pola relasi pemerintah daerah dengan perusahaan setempat khususnya dalam kerangka mempertahankan eksistensi perusahaan sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi di daerah.

Fenomena penekanan pada titik pandang menguntungkan *beneficiaries* bagi kebijakan publik sangat relevan dengan perspektif optimalisasi nilai kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu fungsi administrasi publik yang ditekankan oleh Nicholas Henry (Keban, 2004) dalam analisis paradigma kelima dari perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Pada paradigma kelima dalam pandangan Henry ditekankan bahwa salah satu fokus analisis administrasi Negara yaitu, pada kebijakan publik dengan lokus pada masalah dan kepentingan-kepentingan publik. Terkait dengan konteks kebijakan upah minimum, maka perspektif perubahan kebijakannya dilihat dari nilai nominal upah minimum yang dipilih oleh subsistem kebijakan, seharusnya mencerminkan adanya kepentingan publik atau kelompok buruh.

Pada pihak lain, kebijakan perburuhan pada dasarnya merupakan kebijakan yang amat kompleks dan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro. Hasil penelitian Cox-Edwards (1997) tentang kebijakan perburuhan di negara-negara Asia Timur menjelaskan bahwa pendekatan kebijakan industri yang berbasis intensif tenaga kerja (*labour-intensive*) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini bahwa peningkatan upah sebagai bagian dari kebijakan perburuhan adalah dapat mengurangi kemiskinan sebagai akibat rendahnya pendapatan serta memperbaiki distribusi pendapatan.

Di balik optimistik peningkatan dan pertumbuhan ekonomi sebagai hasil kontributor peningkatan sisi upah pekerja tersebut terdapat dimensi yang bisa memperparah kondisi jangka menengah perekonomian serta ketidakstabilan ekonomi makro dan timbulnya gejolak sosial yang kurang kondusif. Misalnya, persoalan PHK dan juga pemindahan lokasi investasi (*capital flight*).

Logika keterkaitan kenaikan upah dan PHK dan juga menurunnya kinerja pertumbuhan ekonomi telah dibuktikan oleh Alisjahbana dan Manning (2002)

bahwa beberapa perusahaan multi nasional di Indonesia, khususnya kelompok industri elektronik, tekstil, dan sepatu telah meninggalkan Indonesia sebagai akibat meningkatnya komponen biaya upah. Demikian pula, terjadi penurunan permintaan tenaga kerja sebagai akibat meningkatnya upah minimum (Neumark dan Wascher, 1992; Couch and Gleen, lihat Burke, 2004; Burke, 2004).

Pada tingkatan yang lebih mengkhawatirkan telah dianalisis oleh MacIntyre dan Resosudarmo (2003) bahwa kondisi meningkatnya upah buruh dalam skenario kebijakan berbasis berbasis intensif tenaga kerja (*labor-intensive industries*) akan memperburuk perekonomian, seperti kelambatan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja yang stagnan serta mengancam program pengentasan kemiskinan. Demikian pula, berimbas pada sisi terjadinya PHK baik massal maupun non massal Smeru (2001).

Jika ditelusuri lebih lanjut, maka kebijakan perburuhan dengan jalan meningkatkan upah kelompok buruh justru menjadi paradoks dan akan menghasilkan kualitas dan kuantitas pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Konteks isu seperti inilah yang seringkali digunakan oleh kelompok pengusaha sebagai strategi efektif untuk menekan tingkat upah minimum.

Selama ini fenomena interaksi kelompok buruh di Indonesia melalui upaya represif di antara aktor pengusaha dan pemerintah untuk melakukan tawar menawar (*bargaining*) dan kompromi belum menunjukkan kekuatan kolektif yang efektif. Bahkan cenderung terfragmentasi oleh berbagai kepentingan tertentu (Razif, 1998). Hasil penelitian Yeh Fu (2002) di beberapa perusahaan di Taiwan dan juga Bappenas (2004); Anarita dan Resmi (2004) juga membuktikan bahwa tuntutan kelompok buruh yang belum terpenuhi disebabkan oleh masih rendahnya partisipasi mereka dalam proses kebijakan.

Selama dekade tahun 1990 hingga penghujung tahun 2000an, teori dan pendekatan yang digunakan oleh para pakar dalam analisis kebijakan cenderung terfokus pada persoalan struktural dan khirarkhis kebijakan, yang tidak dapat menangkap dan menjelaskan dinamika proses kebijakan publik yang lebih kompleks. Demikian pula, bahwa dalam perspektif demokratis sebagaimana gelombangnya telah mempengaruhi mekanisme preferensi yang cenderung lebih pluralistik

dan membuka ruang partisipasi publik menjadi tidak dapat diabaikan dalam proses kebijakan.

Di samping itu, pendekatan konvensional yang berbasis "iron triangle" seperti dipahami dalam pendekatan *Eastonian* (Gerston, 1983; deLeon, 2003) tidak lagi mampu memberikan penjelasan memadai berkenaan dengan semakin kuatnya tuntutan masyarakat untuk terlibat.

Berkenaan dengan munculnya berbagai kelemahan tersebut, paradigma terakhir dalam analisis kebijakan telah mengkaji dimensi keterlibatan berbagai aktor kebijakan seperti pendekatan analisis subsistem kebijakan (*policy subsystem*). Pendekatan ini menjelaskan bahwa dalam analisis kebijakan publik, ditemukan aktor kebijakan yang terdiri dari komponen dari berbagai level pemerintah maupun swasta atau sebagai perluasan konsep *iron triangle*, seperti dijelaskan oleh Sabatier and Jenikins-Smith (1993, lihat Lindquist, 2001; Hill, 1993).

Dikaitkan dengan fenomena perubahan kebijakan UMP yang melibatkan berbagai aktor, maka kedua pandangan di atas masih menyisahkan beberapa bagian yang perlu diperdebatkan dalam aras kajian kebijakan publik. Misalnya, pada tahap *agenda setting* belum diungkap apakah memang perubahan itu merupakan hasil negosiasi atau perdebatan dalam proses interaksi aktor di dalamnya? Apakah perubahan itu berjalan seperti terjadi dalam konteks perdebatan, tetapi kemudian pada akhirnya tetap ditentukan oleh pemerintah, seperti dalam pendekatan *Iron Triangle*? Sejauhmana perubahan kebijakan itu terjadi sebagai akibat adanya unsur represif yang dilakukan oleh aktor kebijakan UMP di luar skenario *iron triangle*? Bagaimana peran faktor eksternal subsistem kebijakan memberikan pengaruhnya terhadap perubahan pilihan kebijakan para aktor?

KONTEKS PERUBAHAN PILIHAN KEBIJAKAN UMP (KASUS SULAWESI SELATAN)

Merujuk pada mekanisme penetapan UMP yang dilakukan tiap tahun di tingkat Provinsi, maka secara langsung terdapat keterkaitan antara penetapan kebijakan UMP tahun 2006 dengan UMP tahun sebelumnya. Sebab UMP tahun 2005 dianggap dan dipersepsikan oleh aktor pada tingkat DPP, tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan peningkatan kebutuhan

hidup layak kelompok sasaran atau kelompok buruh dan juga diakibatkan oleh adanya dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan tingginya angka inflasi.

Konteks perubahan kebijakan UMP seperti di atas dapat dijelaskan berdasarkan perspektif kerangka kerja koalisi advokasi (*advocacy coalition framework*). Hal ini didasari oleh konteks empirik sebagai berikut: *Pertama*, interaksi para aktor dalam perumusan UMP sangat interdependen dilihat dari sisi proses yang dilalui mulai dari tahap observasi kebutuhan hidup layak, negosiasi besaran nominal UMP, serta penetapan UMP itu sendiri. Akibat interdependensi inilah, agak sulit untuk menentukan kelompok aktor atau koalisi mana mempunyai kekuatan dominan. *Kedua*, terdapat efek eksternal yang mempengaruhi isu tentang nominal UMP yang ditetapkan oleh aktor kebijakan. Misalnya, kenaikan BBM dan perkembangan nilai inflasi yang kemudian menyebabkan angka kebutuhan hidup layak menjadi berubah. *Ketiga*, terdapat proses pembelajaran sebagai salah satu jantung proses perubahan kebijakan dalam perspektif ACF pada tingkat *subsystem* kebijakan UMP.

Ketiga sisi empirik inilah yang mendasari perlunya penjelasan teoritik untuk memahami perubahan dan proses perubahan yang terjadi dalam konteks UMP Sulawesi Selatan dengan memakai pendekatan ACF.

Tabel 1. Persentase Kenaikan UMP Tahun 2006 Pada 7 Provinsi di Indonesia

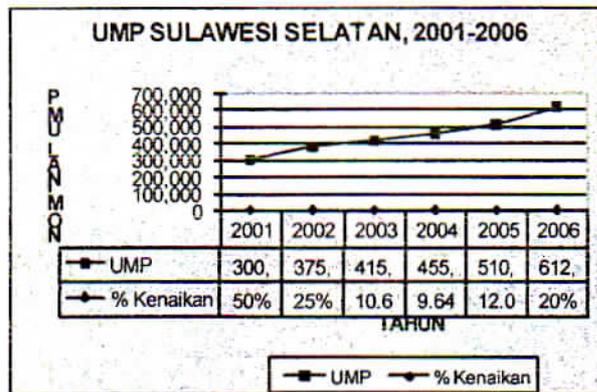
No.	Provinsi	UMP 2005 (Rupiah)	UMP 2006 (Rupiah)	Persentase Kenaikan
1	Riau	557.000	760.000	36,45
2	Nusa Tenggara Timur	450.000	550.000	22,22
3	Kalimantan tengah	523.698	634.260	21,11
4	Sulawesi Selatan	510.000	612.000	20
5	Kalimantan Selatan	536.300	629.000	17,29
6	Jawa Tengah	390.000	450.000	15,38
7	DKI Jakarta	711.843	819.100	15,06

(Sumber: Direktorat Pengupahan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Depnakertrans, 2005)

Jika dibandingkan dengan keadaan upah minimum di negara berkembang lainnya, seperti Bangkok dan Manila yang berada di kawasan Asean, maka kondisi UMP di negara kita masih jauh tertinggal. Tabel 1 di atas memberikan penjelasan bahwa UMP di Indonesia pada umumnya mengalami kenaikan yang tidak seragam antar provinsi. Hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan karakteristik perekonomian secara regional yang kemudian mempengaruhi indeks

kebutuhan hidup layak pekerja yang dijadikan sebagai patokan dasar dalam penetapan UMP. (PerMena-kerTrans, Nomor Per-17/Men/VIII/2005).

Secara regional, perubahan nominal upah minimum Propinsi Sulawesi Selatan pertahun selama tahun 2001 hingga tahun 2006 sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Peningkatan UMP Sulawesi Selatan, 2001-2006

(Sumber: DisNaKerTrans Propinsi Sulawesi Selatan, 2006)

Dalam perspektif teori *ACF*, eksistensi UMP di atas yang menjadi media analisisnya adalah fenomena perdebatan kebijakan (*policy debate*) antar aktor terlibat mesti terjadi dalam skenario siklus dan proses perumusan UMP. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa per provinsi penentuan UMP sangat variatif dan cenderung diputuskan lewat proses perdebatan kebijakan. Konteks perdebatan kebijakan inilah yang merupakan poros analisis kerangka kerja teori *ACF*, di mana di dalamnya terkandung makna adanya tarik menarik dan pengalihan sumber daya antar aktor dalam dimensi subsistem kebijakan UMP.

Permasalahannya adalah mengapa kenaikan itu disepakati sebanyak 20%. Bagaimana perspektif perdebatannya hingga mencapai angka tersebut serta bagaimana kerangka kerja koalisi berjalan sehingga menyepakati angka tersebut? Bagaimana proses perubahan dalam siklus penetapan UMP 2006 di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga sampai pada titik tersebut?

Sabatier mengungkap bahwa dalam memahami proses perubahan kebijakan, seperti terjadi dalam *setting* kebijakan UMP dapat dipahami melalui analisis kerangka kebijakan sebagai produk yang dihasilkan dari kompetisi yang terjadi dari beberapa koalisi advokasi (Sabatier, 1993, lihat Hessel dan Wibowo,

2004:56). Model yang dikembangkan oleh Sabatier untuk memahami secara mendasar proses perubahan kebijakan itu sesungguhnya didasari oleh pemikiran dan hasil penelitian tentang kebijakan lingkungan hidup di AS pada tahun 1960-90an dan juga didasari oleh adanya kelemahan pada model konvensional dan model yang berbasis *stage heuristic* yang ditemukan tidak mampu menjelaskan berbagai dimensi perubahan kebijakan.

Alasan *pertama*, adalah ketidakmampuan untuk melakukan identifikasi berbagai faktor penting yang berperan dan muncul dalam kasus kebijakan tertentu dalam suatu siklus kebijakan. Dalam proses kebijakan, pendekatan ini ternyata telah meremehkan diskresi yang dimiliki dan dilakukan oleh para agen lokal dan pusat dalam proses implementasi kebijakan dari pusat. *Kedua*, pendekatan sebelumnya mengabaikan peran dari berbagai ide, khususnya ide yang berkaitan dengan aspek teknis dari perdebatan kebijakan (*policy debate*) yang terjadi dalam proses kebijakan.

Baik pada pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) sebagai salah satu pendekatan utama yang berbasis *state-centred* dalam analisis kebijakan maupun pendekatan pluralisme yang berbasis *society-centred* tersebut dapat disimpulkan tidak dapat menjelaskan fenomena dan konteks perubahan kebijakan berdasarkan konteks kebijakan UMP yang diungkap di atas. Pendekatan pilihan rasional sesungguhnya hanya memusatkan analisisnya pada pilihan rasional para pengambil kebijakan secara individual. Padahal interaksi antar aktor dalam konteks kebijakan UMP memiliki tingkat *inter-dependency* yang sangat tinggi, oleh karena konsideran kebijakannya selalu diperlukan untuk dibahas melalui mekanisme *tripartite plus*, antara pengusaha, pekerja, pemerintah dan juga pihak perguruan tinggi. (PP No. 107/2003).

Sementara itu, pendekatan pluralisme dalam analisis kebijakan, meskipun telah mampu menjelaskan konteks pengambilan kebijakan publik yang berbasis *inter-dependency* maupun multi aktor seperti dikutip di atas, namun gagal mengungkap proses pembelajaran (*learning process*), dan benturan kepentingan antar kelompok yang memiliki perspektif yang berbeda pada kasus yang sama. Barchrach and Baratz (1970, lihat Tropman, dkk., 1981) mengklaim bahwa pendekatan *pluralist* luput memandang peranan krusial dari kelompok elit strategis dalam membangun agenda

kebijakan yang berbasis kontroversial, khususnya terhadap adanya aspek alokasi sumberdaya kekuasaan dan otoritas yang mendominasi proses di mana kebijakan dirumuskan. Perdebatan ini telah menghasilkan sejumlah kajian (Crenson, 1971, lihat Tropman, dkk., 1981) tetapi pada umumnya sulit untuk mempelajari reaksi aktor politik yang dapat diantisipasi. Hanya kesimpulan Banfield and Wilson (1963, lihat Tropman, dkk., 1981) yang sedikit menjelaskan tentang konflik antar aktor dalam sistem kebijakan publik.

KESIMPULAN

Berbagai analisis dan kajian di atas telah memberikan pemahaman dan penjelasan baik secara konseptual ataupun praktis terhadap perspektif perubahan pilihan aktor kebijakan upah minimum dilihat dari kondisi dan nuansa kebijakan yang berbasis pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi bagi negara. Satu dan lain hal secara umum mendeskripsikan adanya keberpihakan sebagian aktor yang selalu mengandalkan pertumbuhan ekonomi dalam pilihan yang ada. Pada sisi lain, bahwa pilihan aktor kebijakan itu lebih kurang dipengaruhi oleh wacana efisiensi tanpa lebih memberikan prioritas pada aspek kemakmuran masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan itu sendiri.

Dalam kaitan ini telah ditemukan adanya perspektif kapitalistik pilihan aktor dalam penataan kebijakan yang berbasis efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Pertentangan antar aktor tidak lagi dapat diperkirakan pada kondisi bagaimana perubahan itu akan memberikan dampak yang berujung pada sisi dan dimensi kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan kaum buruh sebagai bagian dari aktor terbesar kebijakan upah minimum.

DAFTAR RUJUKAN

- Alisjahbana, A., dan C. Manning. 2002. Survey Of Recent Developments, *Bulletin of Indonesian of Economic Studies*, No. 38, Vol. 3.
- Anarita, P., dan Resmi, S. 2003. Dewan Pengupahan: Strategiskah Sebagai Media Perjuangan Buruh? *Seri Working Paper No.12*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Buchholz, R. 1990. *Essentials of Public Policy for Management*. USA: University of Texas, Dallas.
- Burke, J. 2004. Position Paper on Minimum Wage, *Journal Submitted By The John's Board of Trade*.
- Couto, A., Richard. 1998. Community Coalitions and Grassroots Policies of Empowerment. *Administration & Society*, Vol. 30 No. 5, November 1998, 569–594. © Sage Publications, Inc. USA: Thousand Oaks, CA.
- Coutts, J. 2004. How Do We Solve The Conundrum Of The Minimum Wages, *Bussiness Roundtable*, New Zealand, No. 3., July, 2004. New Zealand.
- Cox, dan Edward, A. 1997. *Labour Market Regulation in Latin America: An Overview*, Washington D.C. , Washington: Brookings Institute Press.
- DeLeon, P. 1998. Introduction: The Evidentiary Base For Policy Analysis: Empiricist Versus Postpositivist Positions, *Policy Studies Journal*, Vol. 26, No. 1, tahun 1998.
- _____. 2003. A History and Projection of the Policy Sociences, Marcel Dekker, Inc. *Principle and Practice of Public Administration*, DOI: 10.1081/120020036.
- Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas. 2004. *Analisis Kebijakan Pasar Kerja untuk Memperluas Kesempatan Kerja*, Bappenas, 2004. Jakarta.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Gerston, N.L. 1983. *Making Public Policy: From Conflict to Resolution*, Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois.
- Hill, M. 1993. Editor, *The Policy Process: A Reader*. Harvester, Wheatsheaf. Maryland Avenue.
- International Labour Organization, 1988. Assessing the Impact of Statutory Minimum Wages in Developing Countries: *Four Country Studies*. ILO Publications, Jenewa.
- _____. 1993. Minimum Wage Fixing, an International Review of Practices and Problem, *Starr, Gerald*, ILO, Jenewa.
- Kusumo, B. 1998. *Nasib Buruh di Bawah Kuasa Negara*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Lester, P.J., and Stewart, J.J.R. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*, Second Edition. USA: Wadsworth/Thompson Learning.
- Lindquist, A.E. 2001. Discerning Policy Influence: Framework for a Strategic Evaluation of IDRC-Support Research, *journal of School of Public Administration, University of Victoria*, September 1, 2001, Victoria, Australia.
- MacIntyre, A. 1997. *Bussiness and Politics in Indonesia*, Allen–Urwin Press, Australia.
- Macintyre, A., dan B. Resosudarmo, 2003. Survey of Recent Development, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, No 39. Vol. 2, Jakarta.

- Manning, C. 1998. *Indonesian Labour In Transition: An East Asian Success Story? Trade and Development Series*, Cambridge University Press, Cambridge.
- _____, 2001. Minimum Wages: Social Policy Versus Economic Policy, *www. Mestpol.un. 2001*.
- Neumark, D., and Wascher, W. 1992. Employment Effects on Minimum and Sub Minimum Wages: Panel Data On State Minimum Wage Laws, *Industrial & Labour Relations Review, Vol. 46, Oktober, 1992*.
- Razif, 1998. *Pengalaman Kelas Buruh dan Industri Manufaktur di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Lappera, Indonesia.
- Smeru. 2001. *Penelitian Pengupahan Daerah*, Lembaga Penelitian Smeru, Oktober 2001. *www. Smeru. or.id*.
- _____, 2002. *Hubungan Industrial Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Smeru, Mei 2002. *www. Smeru. or.id*.
- Stiglitz, E.J. 2002. Employment, Social Justice And Societal Well-Being. *International Labour Review, Vol. 141, No. 1-2, 2002*.
- Tropman, E.J., dkk. ed. 1981. *New Strategic Perspectives on Social Policy*. New York: Pergamon Press.
- World Bank. 2003. *Indonesia Maintaining Stability Deepening Reform Report, No. 25330-Ind. Januari 2003*.
- Yeh, Fu, LI, 2002. The Participation of Labor In The Policy Making of The National Health Insurance in Taiwan, *www. tsd.social.ntu.edu. 2002*. Taiwan.